

# Formulasi Kebijakan Pembangunan Pulau Terluar

MEYZI HERIYANTO

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293  
e-mail: meyzi2000@yahoo.com

**Abstract: Formulation Development Policy Outer Islands.** This study aims to analyze the empirical conditions and formulate development policies in the outer islands of Riau Province Bengkalis. The review focused for photographing the policy to be carried out by the government's allegations and the possibility of strong ketidaksejahteraan separated from the sovereignty of Indonesia. This study uses a participatory approach or also called methods Partisipatory Rural Apraisal (PRA). PRA methods are operated by engaging people to participate in the judgment, finding that recognize and understand the need to be quickly and jointly conduct assessments and mencari solution to the problem at hand. The results suggest the outer island development policy in Bengkalis has not been effective, in the absence of adequate regulation to regulate cross-border issues.

**Abstrak: Formulasi Kebijakan Pembangunan Pulau Terluar.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi empirik dan merumuskan kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kajian difokuskan untuk memotret kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap dugaan-dugaan kuat ketidaksejahteraan dan kemungkinan lepas dari kedaulatan negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatori atau disebut juga dengan metode Partisipatory Rural Apraisal (PRA). Metode PRA dioperasikan dengan melibatkan orang untuk berpartisipasi dalam menilai, menemu-kenali dan memahami suatu yang dibutuhkan secara cepat dan secara bersama-sama melakukan penilaian serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Bengkalis belum berjalan efektif, karena ketiadaan regulasi yang memadai untuk mengatur masalah lintas batas.

**Kata Kunci:** formulasi kebijakan, pembangunan, pulau terluar

## PENDAHULUAN

Provinsi Riau memiliki sejumlah wilayah yang berstruktur pesisir, dengan sebaran pulau terluar yang lumayan tinggi seperti Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Bengkalis, dan beberapa kabupaten lainnya. Kabupaten Bengkalis misalnya, memiliki lima titik lintas batas di antaranya Pulau Rumat, Rangsang, dan Merbau. Pulau Rumat menjadi pulau yang diasumsikan sangat di luar jika dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Jika tidak dikelola secara baik, keberadaannya menjadi sangat rawan, dapat berakibat lepasnya kedaulatan pulau tersebut dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengantisipasi efek perdagangan bebas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan SK Bupati Bengkalis No. 364/IND/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdagangan Lintas Batas

di Kabupaten Bengkalis. Tetapi SK Bupati ini belum berjalan efektif, sedangkan Perda Kabupaten dan Perda Propinsi untuk mengatur masalah lintas batas belum tersedia. Lemahnya efektivitas SK Bupati ini disebabkan adanya berbagai konflik kepentingan dan *vested interest* yang berbeda antara berbagai pelaku di lapangan. Dinas/instansi vertikal lain kurang memahami dan mematuhi aturan yang ada sehingga SK Bupati ini seperti tidak berfungsi.

Sejumlah persoalan lain menjadi penghambat implementasi SK Bupati tersebut. Sebagian besar lokasi daerah perbatasan di Kabupaten Bengkalis masih dalam kategori terpencil/terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan dan gerak langkah masyarakatnya pun relatif rendah. Geografis sebagian wilayah perbatasan/pulau terluar yang berawa dan bergambut, serta distribusi per-

mukiman penduduk yang terpencah menyebabkan ongkos pembangunan menjadi sangat tinggi. Banyaknya TKI/TKW Indonesia yang bekerja secara ilegal dan berprofesi sebagai tenaga kerja tak terdidik menjadikan imej bangsa Indonesia rendah di mata masyarakat negara tetangga Malaysia. Hal ini menjadikan adanya rasa rendah diri bagi para pelaku lintas batas dalam melakukan negosiasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi perbatasan.

Masalah lain adalah minimnya sarana komunikasi, transportasi dan fasilitas yang tersedia menyebabkan mereka lebih mudah mengakses informasi dari Malaysia. Kondisi ini menyebabkan rendahnya rasa nasionalisme sebagai akibat adanya perasaan sebagai bangsa yang dianaktirikan dalam pembangunan. Belum lagi perbedaan nilai kurs rupiah dan ringgit memberikan peluang untuk terjadinya arus barang/jasa secara ilegal. Masih terjadinya kurang koordinasi dan mis persepsi terhadap peraturan yang ada seringkali menyebabkan tidak efektifnya pengamanan jalur perbatasan. Kurangnya tenaga keamanan, peralatan dan SDM yang memadai dalam memelihara perbatasan turut memperburuk permasalahan yang ada. Tambahan lagi pos lintas batas yang ada juga tidak berfungsi dengan baik.

Khusus di Kabupaten Bengkalis kriteria pulau kecil hampir tidak ada, justru yang ada adalah pulau terluar. Konsep pulau terluar adalah wilayah/pulau yang secara geografis berada paling luar dan berbatasan langsung dengan wilayah perairan/negara lain. Yang secara tidak langsung dalam konteks ini pulau terluar atas kondisinya seperti menjadikan wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain. Menurut konsep tersebut, maka pulau terluar yang ada di Kabupaten Bengkalis yang menjadi daerah/pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain adalah Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang, Pulau Rupat dan Pulau Merbau.

Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau terluar ini memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang misalnya di Sabang, Sebatik dan Batam yang juga rawan terhadap penye-

lundupan barang-barang ilegal, narkoba, senjata, dan obat-obatan terlarang. Sebanyak 92 buah pulau kecil terletak di perbatasan dengan negara lain yang berarti bahwa pulau-pulau kecil tersebut memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Wilayah pulau-pulau terluar memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya (*resource based industry*) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan dan industri-industri lainnya yang ramah lingkungan. Di samping itu, pulau-pulau ini juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.

Lindlom dalam Wahab (1977) mendefinisikan formulasi kebijakan publik sebagai “an extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end the boundaries of which are most uncertain. Somehow a complex set of forces that we call policy-making all taken together, produce effect called policies”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi empirik dan merumuskan kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Bengkalis. Tulisan ini memfokuskan untuk memotret kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap dugaan-dugaan kuat ketidaksejahteraan dan kemungkinan lepas dari kedaulatan negara Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatori atau disebut juga dengan metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Metode PRA dioperasikan dengan melibatkan orang untuk berpartisipasi dalam menilai, menemukan dan memahami suatu yang dibutuhkan secara cepat dan secara bersama-sama melakukan penilaian serta mencari solusi atas masalah yang ditemukan/dihadapi. Metode PRA dimaksudkan untuk mengembangkan sikap saling belajar dalam memahami kondisi masyarakat itu sendiri sehingga terjadi kerangka cara pandang yang sama dan sinergis. Hal paling

mendasar dari metode ini adalah kepada pengembangan kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaan mereka sendiri dalam melakukan perencanaan serta kegiatan aksi. Oleh karena itu, PRA ini ditujukan untuk menghasilkan rancangan program yang relevan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa dalam rangka penguatan kebijakan di lokasi penelitian.

Data didapatkan kombinasi dari kombinasi antara *field research* dan *library research*. Berpedoman pada permasalahan yang menjadi topik penelitian, *field research* dilakukan dengan mengobservasi obyek penelitian dan mewawancarai sejumlah narasumber di desa lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pertanyaan semi-terstruktur (diskusi berfokus). Peneliti melakukan perbincangan dengan responden mulai dari perbincangan yang ringan-ringan hingga serius, merekam dan melakukan pencatatan etnografi sesuai persoalan yang menjadi perhatian penelitian. Kepada mereka dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pegangan peneliti melakukan wawancara secara cair dan akrab tetapi mengena pada pokok permasalahan yang dibutuhkan.

## HASIL

Kabupaten Bengkalis memiliki wilayah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia cukup banyak yaitu, Pulau Bengkalis, Rupa, Rangsang dan Merbau. Konsekuensinya penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan. Apalagi Kabupaten Bengkalis memiliki geografis daerah kepulauan, maka pola penyebaran penduduk dan akselerasi pembangunannya pun masih mengalami berbagai kendala. Kesulitan utama dalam pembangunan perbatasan di Kabupaten Bengkalis adalah masalah komunikasi, transportasi dan pemerataan pembangunan yang membutuhkan biaya yang mahal. Sementara itu sebagai kawasan perbatasan, Kabupaten Bengkalis selain memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan penduduknya dalam konteks kewilayahan perbatasan, tetapi di sisi lain juga mengandung banyak masalah kerawanan.

Kondisi ini disebabkan pola penyebaran penduduk yang tidak merata dengan tingkat kesejahteraan yang rendah terus meningkat. Sementara itu kawasan perbatasan perlu dipercepat pembangunannya mengingat: 1) Sebagian besar lokasinya masih dalam katagori terpencil/terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, sehingga tingkat mobilitas kehidupan dan gerak langkah masyarakatnya pun relatif rendah; 2) Tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan masih sangat rendah; 3) Banyaknya TKI/TKW Indonesia yang bekerja secara ilegal dan berprofesi sebagai tenaga kerja tak terdidik menjadikan imej bangsa Indonesia rendah di mata masyarakat Malaysia. Hal ini menjadikan adanya rasa rendah diri bagi para pelaku lintas batas dalam melakukan negosiasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi perbatasan; 4) Minimnya sarana komunikasi, transportasi dan fasilitas yang tersedia menyebabkan mereka lebih mudah mengakses informasi dari negara lain (Malaysia) yang menyebabkan rendahnya rasa nasionalisme, sebagai akibat adanya perasaan sebagai bangsa yang dianaktirikan dalam pembangunan.

Dari hasil *Forum Group Discussion* (FGD) dengan beberapa *stakeholder* terkait, diketahui bahwa permasalahan yang sering timbul di kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkalis dalam konteks keamanan dan ketertiban adalah karena minimnya tenaga personil keamanan dan lemahnya penegakkan hukum, serta kualitas peraturan perundang-undangan dan profesionalisme aparat penegak hukum yang masih rendah. Dari kondisi itu, maka permasalahan lain yang timbul antara lain SK Bupati No 364/IND/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perdagangan Lintas Batas di Kabupaten Bengkalis belum efektif dan dipahami/dijalankan secara benar oleh semua *stakeholder* terkait. Padahal dalam SK tersebut paling tidak ada kurang lebih 13 instansi terkait dalam penanganan Pos Lintas Batas (PLB).

Berdasarkan data di lapangan menyebutkan SK Bupati tersebut tidak cukup ampuh untuk melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, karena masing-masing dinas/instansi yang ada sebagian

bukan di bawah Bupati secara langsung, melainkan dinas/instansi vertikal (dekonsentrasi). Akibatnya penanganan ilegal market dan lain sebagainya masih sering terjadi. ini semua akibat kurang memadainya sarana dan prasarana serta fasilitas CIQS (bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan) di kawasan perbatasan dan Pos Lintas Batas yang ada (di Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang tidak berjalan dan kemudian dipindahkan ke Tanjung Samak (PLB) ini belum berjalan. Sementara untuk di Rangsang Barat dan Merbau belum ada. Untuk di Pulau Rupa (PLB) Tanjung Medang juga belum berfungsi dengan benar, karena potensinya hanya sebatas ikan tidak ada yang lain. Tambahan lagi menurut hasil FGD di Tanjung Medang pada musim-musim tertentu sangat rawan karena ombak yang terlalu besar dan tinggi sehingga menyulitkan para pelaku lintas batas. Kesulitan lain dalam pengembangan PLB di Pulau Rupa, dengan hanya mengandalkan potensi ikan, banyak para nelayan lebih suka menjual hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul ikan (*bang li au*) yang banyak bermukim di Tanjung Medang.

Aksesibilitas menuju kawasan perbatasan umumnya relatif masih kurang memadai. Padahal peningkatan produksi (barang dan jasa) dan peluang pasar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor industri jasa dan perdagangan akan sangat terbuka luas, apabila ada akses sarana pendukung yang memadai ke kawasan perbatasan. Sarana pendukung utama dalam meningkatkan peluang tersebut adalah adanya sarana transportasi, komunikasi, listrik, pelayanan air bersih, dan pelayanan perbankan di perbatasan. Sayangnya hal itu tidak ada sama sekali, bahkan PLB tidak berfungsi.

Adanya perbedaan nilai kurs rupiah yang memberikan peluang untuk terjadinya arus barang/jasa secara legal maupun ilegal. Maraknya kegiatan perdagangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku lintas batas tanpa ada pengawasan yang ketat dan lemahnya penegakan hukum, pola ini umumnya dilakukan oleh para pelintas batas tradisional kedua negara. Mereka melintasi perbatasan untuk melakukan kegiatan dan

aktifitas perdagangan lintas negara. Hal ini terjadi, disebabkan oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat sekitar perbatasan serta masih terbatasnya prasarana penunjang bagi sektor perdagangan atau kegiatan usaha lainnya. Adanya upaya perbaikan ekonomi menjadi pemicu banyak pelintas batas. Selain juga dipicu oleh adanya interaksi sosial-budaya masyarakat yang sudah terjalin lama dan serumpun.

Bagi Kabupaten Bengkalis, 'persaingan' yang ketat tentunya akan datang dari negara tetangga terdekat, yaitu Malaysia yang *nota bene* mereka sama-sama penghasil pertanian. Pengembangan industri dan pertanian Malaysia relatif lebih memiliki daya saing dibandingkan pengembangan sektor yang sama di Kabupaten Bengkalis. Pengelolaan pertanian Malaysia sudah mengarah kepada sistem agribisnis modern. Budidaya komoditi unggulan seperti sawit dan nenas telah terintegrasi dengan pengelolaan agroindustri yang tersebar pada beberapa lokasi kawasan industri seperti Sri Gading, Pasir Gudang, Muar, Mersing, Tanjung Langsat, Segamat, Kluang, Simpang Renggam, Senai dan Johor Industrial Park. Aspek pemasaran produk pertanian telah terorganisir dengan baik. Saat ini Malaysia memiliki lembaga pemasaran pertanian persekutuan yang membawahi lembaga-lembaga lainnya untuk setiap komoditi (salah satunya Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia yang berkantor di Johor Bahru). Bahkan secara kontinyu ditetapkan pula hari pasar tani yang tersebar pada senarai tempat di wilayah Johor.

Geografis sebagian wilayah perbatasan/pulau terluar yang berawa dan bergambut, serta distribusi permukiman penduduk yang terpencar menyebabkan ongkos pembangunan sangat tinggi. Pembangunan di wilayah perbatasan harus memperhatikan kaidah keruangan sesuai manfaat dan fungsi, serta harus memiliki rencana tata ruang wilayah pengembangan wilayah perbatasan secara lengkap. Menurut laporan RTRW Kabupaten Bengkalis untuk program hingga 2012 (Bappeda, 2007) bahwa; pengembangan Teluk Belitung (Kec. Merbau) dan Tanjung Samak (Kec. Rangsang) memang diarah untuk pos lintas batas, sentra komoditi pertanian, perkebunan,

wisata dan pertambangan. Sementara untuk Bantar (Kec. Rangsang Barat) bersama Alai (Kec. Tebing Tinggi Barat) diarahkan untuk penyebrangan antar pulau sekaligus sebagai sentra komoditi pertanian. Rencana tata ruang wilayah ini harus dapat pula dijadikan sebagai Master Plan bagi perencanaan pembangunan wilayah khusus perbatasan. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting dalam pembuatan dokumen penataan ruang wilayah bagi kawasan perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Malaysia secara bersama.

Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) masyarakat di wilayah perbatasan terutama terkait dengan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, listrik dan perhubungan masih sangat menonjol. Apabila infrastruktur tidak tersedia dengan baik, maka pembangunan dasar atas ilmu pengetahuan (*knowledge based development*) tidak akan berhasil dengan optimal. Hal ini akan menjadikan kerawanan sosial baru, terutama praktek ilegal market dan kerusakan lingkungan akan terus terjadi sebagai akibat kemiskinan. Masalah lain ditemui adalah masih lemahnya penegakkan supremasi hukum dan profesionalisme aparatur pemerintah di perbatasan. Ini ditandai dari masih adanya keberpihakkan penegakkan dan penerapan supremasi hukum kepada sebagian golongan, telah mengakibatkan sikap ketidakpercayaan lagi masyarakat kepada hukum dan keadilan. Apalagi harus diakui kebutuhan personil pengamanan masih sangat kurang.

## PEMBAHASAN

Kebijakan pengembangan kawasan perbatasan yang merupakan bagian integral dari strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memberikan penekanan terhadap pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, dan kegiatan pendukung lainnya sangatlah diperlukan. Khusus dalam penanganan kawasan perbatasan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemda Kabupaten Bengkalis meliputi kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya, dengan jalan pengembangan ekonomi masya-

rakat, dengan sektor utama pertanian dalam arti luas, yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan, serta sektor lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kegiatan pembinaan kelompok nelayan, pelatihan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, bantuan sarana dan prasarana berupa penyediaan kapal motor dan alat-alat tangkap. Perlunya melakukan pelestarian budaya lokal, antara lain dengan menjadikan kegiatan budaya sebagai even tahunan seperti mandi safar dan permainan rakyat lainnya.

Kendatipun demikian, RTRW Kabupaten Bengkalis (2002-2012), tetap berupaya untuk meningkatkan daya saing wilayah sekaligus menciptakan sinergi perkembangan wilayah Kabupaten Bengkalis dengan wilayah kabupaten lain yang berbatasan dengannya. Untuk Pemda Bengkalis melakukan langkah strategi dan arah kebijakan yang diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan yang akan mewarnai arahan tata ruang wilayah yang bersangkutan, antara lain meliputi: 1) Meningkatkan kemampuan SDM Tempatan, agar lebih siap dalam menghadapi era globalisasi; 2) Mengembangkan sistem transportasi wilayah darat dan laut secara terpadu dan mengusahakan setiap pusat-pusat permukiman dan kegiatan ekonomi memiliki aksesibilitas yang cukup baik (mudah dicapai); 3) Melakukan identifikasi potensi dan peluang-peluang pengembangan kegiatan ekonomi; 4) Menetapkan sektor dan subsektor serta komoditi unggulan setiap wilayah; 5) Mendeliniasi lahan-lahan potensial untuk kegiatan investasi; 6) Mendorong pengembangan poros Duri, Bukit Batu, Bengkalis dan Bantan yang akan berfungsi sebagai jalur penghubung utama dari Riau daratan menuju Malaka; 7) Mempersiapkan pelabuhan Tanjung Medang (Rupat), Selat baru (diubah menjadi Sungai Liong Bantan) Tanjung Gedabu (yang kini diganti menjadi Tanjung Samak Rangsang), sungai Pakning (Bukit Batu) dan Teluk Belitung (Merbau) sebagai pelabuhan bebas dan pintu keluar dan masuk (*exit dan entry point*) di Kabupaten Bengkalis; dan 8) Mengusulkan pembangunan jembatan penghubung antar

pulau (Bengkalis, Padang, Merbau, Tebing Tinggi dan Rangsang).

Untuk dapat mengatasi isu dan permasalahan wilayah perbatasan antarnegara di Kabupaten Bengkalis, maka diperlukan strategi karena wilayah perbatasan ini berfungsi sebagai sekat pembatas kedaulatan NKRI dengan Negara Malaysia. Dalam hal ini strategi yang perlu dilakukan adalah: 1) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Dalam upaya memberdayakan ekonomi rakyat di wilayah perbatasan perlu ditindak lanjuti melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*), antara lain dengan pemberian pinjaman modal kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk kepentingan itulah sangat diperlukan suatu lembaga keuangan non bank berbentuk BUMD dengan status perseroan terbatas; 2) Pengembangan ekonomi. Kondisi ekonomi di wilayah perbatasan perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Diperlukan penunjang proses kegiatan produksi dan pemasaran, serta menciptakan iklim bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktifitas dan kelangsungan usaha masyarakat serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya ekonomi wilayah perbatasan yang menunjang kesempatan kerja dan usaha, serta keterkaitan ekonomi antarwilayah dan antarnegara yang saling menguntungkan; 3) Peningkatan Perhatian Terhadap Masalah Keamanan Dan Ketertiban. Terdapat berbagai masalah yang menyangkut dengan pertahanan dan keamanan, hal ini dapat dipicu oleh belum ditetapkannya batas-batas wilayah, terdapatnya pulau-pulau terluar yang rawan terhadap tindak kriminal, belum adanya kelembagaan yang mengelola wilayah perbatasan secara integral dan terpadu, serta masih banyak pelanggaran terhadap kedaulatan hukum negara RI seperti adanya penyelundupan dengan sasaran minyak/BBM, ilegal logging, ranmor, narkoba, daging, sembako, rokok, miras dan kekayaan negara lainnya.

Beberapa faktor pendukung pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam kerangka makro perekonomian regional adalah: 1) Memiliki latar

belakang budaya dan sejarah (*cultural background*) yang relatif sama sehingga memudahkan terciptanya kerjasama yang baik antara keduanya; 2) Memiliki potensi sumberdaya wilayah yang relatif sama khususnya industri dan pertanian sehingga dapat diarahkan melalui mekanisme produksi, pemasaran serta R & D bersama dalam suatu hubungan aliansi strategis nonkompetisi. Khusus untuk produk pertanian, Pemerintah Bengkalis dapat melakukan kerjasama pemasaran dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Malaysia yang telah terorganisir dengan baik; 3) Memiliki pendapatan yang besar dari sektor migas dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan bagi pengembangan sektor unggulan lain beserta prasarana pendukungnya. Dengan demikian memiliki modal dasar yang cukup untuk mempersiapkan diri memasuki pasar bebas; 4) Telah didukung oleh adanya Kebijakan perdagangan lintas batas (Sosek Malindo dan AFTA).

Di samping faktor pendukung di atas, beberapa hal yang diduga akan menghambat peran aktif Kabupaten Bengkalis dalam masalah perekonomian regional perbatasan adalah: 1) Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis, baik dari segi tingkat pendidikan maupun kesiapan mental dalam menghadapi persaingan; 2) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing; 3) Rendahnya ketersediaan prasarana transportasi yang memadai sehingga menghambat minat investasi dalam pengembangan sektor-sektor lainnya terutama di desa-desa perbatasan; 4) Dominasi tanah gambut di daerah perbatasan yang membuat pengelolaan pertanian menjadi sangat mahal karena membutuhkan perlakuan yang intensif.

Bila semua strategi pengembangan ekonomi di atas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diskenarioikan, maka arah perkembangan ekonomi wilayah perbatasan akan berhasil. Untuk semua itu, maka serangkaian tindakan yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, mengidentifikasi peluang-peluang investasi pada setiap



sektor unggulan yang ingin dipromosikan sebagai basis perekonomian baru, utamanya di daerah perbatasan. *Kedua*, mengembangkan kegiatan industri yang berbasis kepada komoditi pertanian, perikanan, dan kehutanan, sehingga terjadi proses nilai tambah melalui pendalaman struktur produksi menjadi komoditi industri yang menguntungkan. *Ketiga*, menciptakan lembaga pemasaran komoditi pertanian dan lembaga pengembangan agribisnis serta menjalin kerjasama dengan lembaga pemasaran pertanian persekutuan yang telah terbentuk. *Keempat*, memberikan paket-paket insentif melalui upaya pengembangan prasarana dasar wilayah seperti transportasi, komunikasi, listrik dan air bersih guna meningkatkan daya saing wilayah dalam menangkap peluang investasi dalam rangka pengembangan sektor-sektor unggulan baru. *Kelima*, membentuk lembaga pengembangan ekonomi rakyat pada setiap kecamatan serta mengidentifikasi jenis usaha unggulan, kelompok binaan, permodalan dan jaringan pemasaran sesuai dengan konsep pengembangan *Community Based Development (CBD)*.

## SIMPULAN

Formulasi kebijakan pembangunan pulau terluar di Kabupaten Bengkalis belum berjalan efektif. Pada masa mendatang Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus merangsang terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Balitbang Dephan, Desember 2003, "Pengembangan Strategi Pengamanan Daerah Perbatasan Guna Penegakan Kedaulatan Negara dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara" Jakarta.
- Karim Hings Abdillah., 2000, *Mendayagunakan Wilayah Perbatasan Dengan Meningkatkan Peran dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraannya Guna Pemantapan Integritas Bangsa*. Lemhanas. Jakarta.
- Kompas Cyber Media, edisi 23 April 2002, Masalah Perbatasan dan Profesionalisme Tentara, <http://www.kompas.com>
- Kompas Cyber Media, edisi 23 Desember 2002, Tinakaren, Kemewahan di Perbatasan, <http://www.kompas.com>,
- Kompas, edisi 3 Januari 2003, Lima Pulau Lagi Masih Sengketa Dengan Negara Tetangga, Jakarta.
- Kompas, edisi 9 Februari 2003, Delapan Pulau di Perbatasan Miskin, Jakarta.
- Nurbaya Siti, 2001, Pengelolaan Perbatasan Negara. <http://www.perbatasan.com>

Strateginya adalah mendukung pengembangan kualitas SDM melalui penekanan prioritas pembangunan pada sektor pendidikan beserta bantuan sarana dan prasarananya. Perlu juga untuk membentuk kelembagaan perbankan di pedesaan untuk mendukung pengembangan sektor unggulan serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis antar daerah. Kemudian memberikan insentif yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan kebutuhan pembangunan secara lintas sektoral selama tidak bertentangan dengan kesepakatan pasar bebas.

Secara lebih luas perlu dibuat aturan perundang-undangan yang tegas dan konsekuen dengan melibatkan unsur terkait dalam pengamanan, perdagangan pelaku lintas batas untuk melindungi masyarakat tempatan dan wilayah Bengkalis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus memiliki kekuatan hukum, sanksi dan koordinasi yang tegas meliputi berbagai *stakeholder* terkait dalam penanganan lintas batas sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam SK Bupati No. 364/IND/2001. Dan yang utama adalah masyarakat dituntut meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta meningkatkan mental bersaing, terus mengembangkan kemampuan dasar di era global khususnya pendidikan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang ada.

- Pellindou P. Jack A, 2002. *Peningkatan Kerjasama Antar Negara Perbatasan Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*. Lemhanas. Jakarta.
- Republika Online, 2003, edisi 15 Januari 2003, Pulau Nipah Akan Dikembangkan Untuk Pariwisata, <http://www.Forek.or.id>
- Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan, <http://www.Perbatasan.com>
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 1995, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Tempo, edisi 19 Desember 2002, KSAL: Ada Sejumlah Pulau Kecil Indonesia yang Berpotensi Diklaim Negara Lain, <http://www.tempointeraktif.com>
- Wahab, Solihin Abdul, 1999. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.